

Matriks Penyusunan Rencana Kerja Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Tahun 2023

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET	RAK	RPJMN 2020-2024				JANJI PRESIDEN	MAJOR PROJECT	ISU STRATEGIS BIDANG PMK	USULAN ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROYEK PRIORITAS (ProP)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Koordinasi Kebijakan Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	RAK Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	2 RAK	RAK Pengurangan Risiko Bencana	PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP2 Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	KP1 Penanggulangan Bencana	01-Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana 02-Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana 03-Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan 04-Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana 07-Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu		Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	1.Tingginya Kerentanan dan Risiko Bencana 2. Peningkatan Potensi Dampak dan Bahaya Perubahan Iklim Peningkatan potensi banjir, penurunan ketersediaan air, dan cekaman kekeringan	750,000,000	Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
				RAK Penanganan Konflik Sosial,	PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan	KP1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01-Peningkatan Deradikalisasi dan		Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme dan Terorisme	1.Terjadinya peningkatan kejadian konflik melewati target yang ditetapkan pada RPJMN	750.000.000	Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

				Radikalisme, dan Terorisme	dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional		Penanganan Terorisme			2.Telah Terbentuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2020-2024 telah ditetapkan melalui Permenko PMK No. 5 Tahun 2021 (revisi dari Permenko Kesra No. 7 Tahun 2014 namun belum terbentuk Rencana Aksi daerah (RAD))		
2	Koordinasi Kebijakan Bidang Mitigasi Bencana	RAK Koordinasi Penyusunan Mekanisme Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (<i>Disaster Pooling Fund</i>)	1 RAK	RAK Pengurangan Risiko Bencana	PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP2 Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	KP1 Penanggulangan Bencana	01- Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana 02- Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana 03- Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan 04-Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu		Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	1. Tingginya Kerentanan dan Risiko Bencana <ul style="list-style-type: none"> Beragamnya risiko bencana, kebanyakan merupakan bencana hidrometeorologis (terkait iklim); Tingginya potensi bencana geologis (gempa, tsunami, erupsi gunung api) Tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana Kebanyakan area pemukiman, infrastruktur dan konektivitas dasar dibangun pada zona rawan bencana Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai 2. Peningkatan Potensi Dampak dan Bahaya Perubahan Iklim Peningkatan potensi banjir, penurunan ketersediaan air, dan cekaman kekeringan	1,000,000,000	Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

3	Koordinasi Kebijakan Bidang Konflik Sosial	RAK Pengembangan Aplikasi <i>Mobile</i> Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)	1 RAK	RAK Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme, dan Terorisme	PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	KP1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01- Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme 02- Penanganan Konflik Secara Humanis 03- Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana		Penguatan Platform Sistem Peringatan Dini penanganan konflik Sosial	1.Sistem Nasioal Pemantauan Kekerasan (SNPK) Merupakan Amanah Undang-Undang dimana perlu dibangun sistem peringatan dini oleh Pemerintah untuk mencegah konflik di daerah rawan konflik dan/atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan suatu sistem informasi yang menyediakan data konflik/kekerasan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan Penanganan konflik Sosial. 2.Belum ada Platform Sistem Peringatan Dini penanganan konflik Sosial yang dibangun K/L	1.500.000.000	Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
TOTAL											4,000,000,000		

Jakarta, 23 Maret 2022

Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial



 Andre Notohamijoyo